

Terawan: Saya Disumpah untuk Baktikan Hidup untuk Masyarakat

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sangat bangga menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Meski dirinya dipecah sebagai anggota, baginya IDI tetap sebagai rumah kedua dan tempatnya bernebang. "Sampai hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun disana (IDI)," kata Terawan, seperti ditirukan eks Tenaga Ahli Menkes Era Terawan, Andi Senin (28/3).

Andi mengungkapkan, Terawan pun ikut mengimbu seluruh pihak untuk menahan diri. Menurut Andi, Terawan berkeinginan agar kejadian ini tidak menjadi polemik berkepanjangan lantaran masih menghadapi pandemi Covid-19.

"Pak Terawan mengimbu, teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik, karena kita

masih menghadapi pandemi Covid-19. Kasian masyarakat dan saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain ikut terganggu," ujarnya.

Terawan turut menyinggung soal sumpah dokter yang dijadikan landasan dalam setiap langkahnya mengambil keputusan. Dari sumpah itu, kepentingan masyarakat jadi yang utama. "Saya sudah disumpah akan selalu membaktikan hidup saya guna perikemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien dan kepentingan masyarakat," ujar Andi menirukan ucapan Terawan.

Terawan juga menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangi saudara sejawatnya dan hormat kepada para guru. Menurutnya, semua dokter itu sesuai sumpah dokter, teman sejawat dianggapnya seperti saudara kandung. Jadi dia menyayangi semua rekan sejawatnya yang ada di IDI. © han

Pengadaan Gorden untuk Rumah Dinas Anggota DPR Dianggarkan Rp48,7 Miliar

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, belum diganti sejak tahun 2015 lalu.

Hal ini disampaikan Dasco merespons adanya pengadaan penggantian gorden dengan anggaran senilai Rp 48.745.624.000. "Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3).

Dasco menuturkannya, pengadaan gorden baru dilakukan tahun ini karena anggarannya tidak mencukupi pada tahun-tahun sebelumnya. Politikus Partai Gerindra itu pun mengklaim, kondisi gorden di rumah jabatan tersebut sudah lama dikeluhkan oleh para anggota dewan.

"Diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang

terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco.

Kendati demikian, Dasco mengaku tidak tahu menahu mengenai spesifikasi gorden yang akan dibeli.

Harga gorden ini menjadi sorotan karena setiap anggota dewan diperkirakan akan mendapat gorden senilai Rp 84,7 juta, hasil pembagian anggaran Rp 48,7 miliar dibagi dengan jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. "Masalah spek dan lain-lain kita enggak ikut campur ya, karena itu Rp 80 juta itu sudah termasuk pajak dan lain-lain," ujar Dasco.

Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang dengan nama "Penggantian Gorden dan Blind DPR RI Kalibata" dengan pagu paket sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 45.767.446.332,84." © me

IDN/ANTARA



PRAJURIT MARINIR GUGUR DISERANG KST Prajurit TNI AL mengangkat peti jenazah prajurit Marinir TNI AL Lettu Marinir (Anumerta) Muhammad Iqbal saat upacara pelepasan jenazah di Timika, Papua, Senin (28/3). Dua prajurit Marinir TNI AL yakni Lettu Marinir (Anumerta) Muhammad Iqbal dan Praka Marinir (Anumerta) Wilson Anderson Here gugur dalam serangan kelompok separatis teroris (KST) di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu (26/3).

Tiga Anak Rahmat Effendi Dicecar Penyidik KPK soal Pengelolaan Aset

JAKARTA (IM) - Tiga anak Waqli Kota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi atau yang akrab dipanggil Pepen, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan tersangka Mulyadi.

Ketiganya adalah Ramadhan Aditya selaku Direktur Utama (Dirut) Arhamdhan Ireyndaldi Rizky, Irene Pusbandari selaku Direktur PT AIR; serta Reynaldi Aditama selaku Komisaris PT AIR.

Menurut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, ketiganya dicecar soal pengelolaan aset-aset milik Rahmat Effendi. Diduga, aset yang dialami KPK tersebut merupakan hasil korupsi yang dilakukan oleh Rahmat Effendi.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, M Buyamin yang menjabat Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Mulyadi, Lurah Kati Sari, Wahyudin, Camat Jatiasampurna, serta Jumhana Lutfi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan

Kota Bekasi.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energiindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. © me

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



DISKUSI PUBLIK PERJUANGAN POLITK SABAM SIRAIT

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berfoto bersama mantan Ketua DPR Akbar Tandjung (tengah) dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) di sela diskusi publik bertajuk Sabam Sirait dalam berjuang bagi demokrasi dan HAM di Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Diskusi tersebut membahas perjuangan Sabam Sirait dalam menjalankan peran politisinya dalam konteks Demokrasi.

PDIP Sebut Menteri yang Membahas Penundaan Pemilu Tak Paham Konstitusi

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan para menteri agar bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto kembali menyindir menteri yang melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024. Apalagi masalah pemilu bukan menjadi tupoksi kementerian.

Menurut Hasto seorang menteri yang berkomentar yang ada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), maka itu artinya si menteri tidak memahami Undang-Undang

Dasar 1945. "Menteri yang terus ngotot berbicara di luar kewenangannya, itu tidak memahami hakikat konstitusi kita ini," kata Hasto, Senin (28/3). Mengingat Hasto tidak menyebut nama menteri yang dimaksud. Namun, dia meminta supaya para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ikut mendorong soal wacana penundaan pemilu. Dia juga mengingatkan para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugas, pokok,

dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, kata Hasto, presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan mengakui konstitusi Indonesia belum sempurna. Namun, saat ini mereka memilih fokus mengedepankan kepentingan rakyat.

"Meskipun PDIP tahu kalau konstitusi kita belum sempurna, tetapi skala prioritas kota adalah bantu rakyat dulu," tegasnya.

Sebelumnya, 14 Maret 2022 lalu, Hasto secara tegas mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berpendapat

soal wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, atau Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Menurutnya, isu terkait pemilu bukan masuk ranah kementerian yang dipimpin Luhut.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," kata Hasto dalam siaran pers. Pada 15 Maret 2022,

Apalagi Luhut mengklaim mempunyai 110 juta data digital (big data) tentang dukungan masyarakat yang menginginkan supaya pemilu ditunda dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk menjaga proses pemulihan perekonomian, dan rakyat masih menghendaki Presiden Joko Widodo memimpin.

Akan tetapi, Luhut men-

lak membuka data itu kepada masyarakat.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presideni G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Luhut juga menepis tuduhan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar. Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?," ujar Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga sempat melontarkan wacana penundaan pemilu 2024. Menurut Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar, mereka hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi, aspirasi itu tidak boleh ditolak apalagi kita suara Golkar adalah suara rakyat, nah oleh karena itu posisi seperti demikian," kata Airlangga usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3) lalu. © han

TNI AL Kibarkan Bendera Setengah Tiang Selama Tiga Hari Atas Gugurnya 2 Anggotanya

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari, terhitung mulai Senin (28/3) hingga Rabu (30/3).

Bendera itu diperuntukkan sebagai tanda duka cita atas gugurnya dua anggota TNI AL setelah ditembak setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Pos Quarry Bawah, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Kedua anggota yang gugur yaitu Letda Mar Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Here.

"Sebagai ungkapan bela sungkawa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan seluruh jajaran TNI AL mengibarkan bendera setengah tiang selama 3 hari berturut-turut mulai Senin 28 Maret 2022," tulis Dispenal dalam keterangannya, Minggu (27/3)..

Selain itu bagi anggota TNI AL yang beragama Islam, Yudo memerintahkan untuk melakukan salat ghaib. Sedangkan untuk mereka yang beragama lain akan melakukan doa bersama.

"Melaksanakan sholat ghoib/berdoa bersama dipimpin paroh sesuai agama masing-masing," katanya.

Adapun penyerangan tersebut dilakukan oleh KKB

Papuan Kodap III Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya.

Dari penyerangan itu, prajurit Serda Mar Rendi Febriansyah dan Serda Mar Ebit Erisman mengalami luka berat.

Selanjutnya, terdapat enam prajurit yang terkena luka ringan.

Mereka atas nama Serda Mar Bayu Pratama, Pratu Mar Rahmad Sulman, Prada Mar Dicky Sugara, Pratu Mar Adik Saputra A, Prada Mar La Harmin, dan Prada Mar Alif Dwi Putra.

"Pos Quarry Bawah Satgas Mupe Yonif 3 Marinir Pasmar 2 berkekuatan 35 personel," kata Dispenal.

Lokasi pos berada kurang lebih 1 km dari Polres Nduga, dan 2 km dari Koramil Nduga. Selama ini, kata Dispenal, Pos Quarry Bawah tidak memiliki permasalahan dengan masyarakat di sekitar Pos.

Bahkan anggota kerap menggelar kegiatan bakti sosial, seperti menggelar mobil sehat, mobil pintar, lomba-lomba, kegiatan adat dan kegiatan agama.

"Atas kejadian ini TNI AL dan masyarakat Papua berduka akibat gugurnya 2 prajurit Marinir TNI AL terbaik yang selalu dekat dan membantu masyarakat sekitarnya," ujarnya. © han



PDIP DEMO MASAK TANPA MINYAK GORENG SAWIT Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat menunjukkan minyak kelapa produksi kader partainya dalam demo masak tanpa minyak goreng di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (28/3). Kegiatan tersebut digelar untuk mengampanyekan diversifikasi pangan tanpa gorengan sekaligus sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak goreng kelapa sawit.

PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada tanggal 28 Maret 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Debitor Johan Wijaya Bong.
2. Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp. 750.000.000.00.
3. Cessionaris a.n. Frastistodjati yang bertempat tinggal di Bekasi Timuer Regensi I 9/48 RT.002, RW. 018, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt. 28 Maret 2022 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama Johan Wijaya Bong telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2